



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 17 /KEP/DPRD-KLU/2021

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 239 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Penetapan Propemperda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 telah dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lombok Utara sebagai daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);

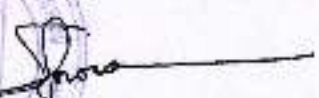
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 29 Nopember 2021

DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA,


NASRUDIN, SH.I

Tembusan:

1. Yth. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 17 /KEP/DPRD-KLU/2021
 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2021

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022**

I. RAPERDA USULAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

No	JUDUL RAPERDA	OPD PEMRAKARSA	KETR
1	2	3	4
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah	Bagian Ekonomi SDA Setda KLU	Propemperda Tahun 2022
2.	Penataan Kawasan Kumuh	Bappeda dan DPUPR-PKP	Propemperda Tahun 2022
3.	Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas PM, PTSP dan NAKER	Propemperda Tahun 2022
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Perseroan Daerah Tata Tunas Berkah	Bagian Ekonomi SDA Setda KLU	Propemperda Tahun 2022
5.	Bangunan Gedung	DPUPR-PKP	Propemperda Tahun 2022
6.	Penyelenggaraan Pendidikan	DIKBUDPORA	Propemperda Tahun 2018
7.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Dinas PM, PTSP dan NAKER	Propemperda Tahun 2022
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR-PKP	Propemperda Tahun 2021
9.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Lombok Utara	DPKP	Propemperda Tahun 2022
10.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	DKPPP	Propemperda Tahun 2022
11.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	DISPAR	Propemperda Tahun 2022
12.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada PDAM Amerta Dayan Gunung	Bagian Ekonomi SDA Setda KLU	Propemperda Tahun 2022

II. RAPERDA USULAN INISIATIF DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA

No	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETR
1	2	3	4
1.	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Lombok Utara	DPRD KLU	Propemperda Tahun 2021
2.	Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Utara	DPRD KLU	Propemperda Tahun 2021

DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA,



NASRUDIN, SH.I